

**MID-YEAR**  
**ECONOMIC REVIEW 2025**

**TERHIMPIT PERLAMBATAN  
DOMESTIK, TERGUNCANG  
RISIKO GLOBAL**

**24**  
**JULI**  
**2025**

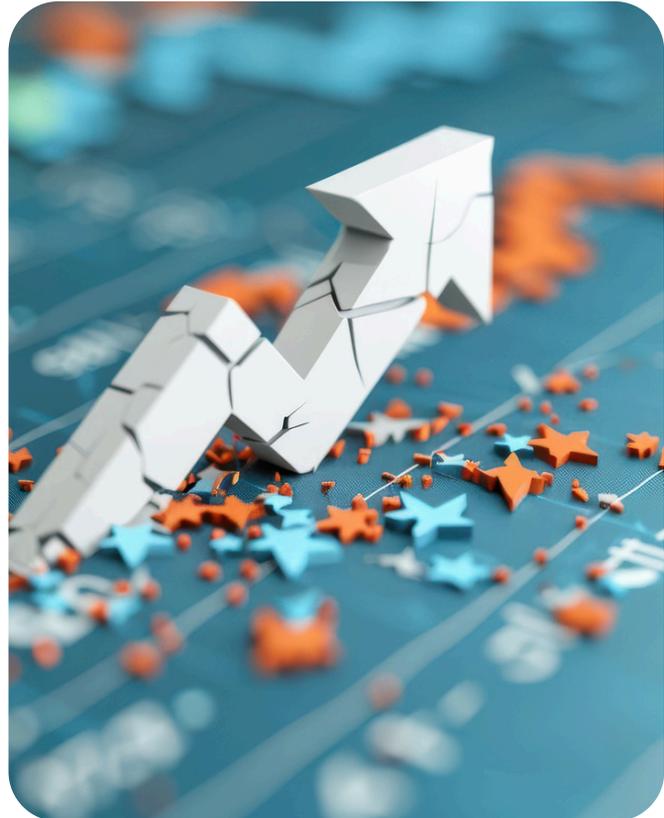
# Terhimpit Perlambatan Domestik, Terguncang Risiko Global

## Ringkasan Utama

- CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 melambat ke kisaran 4,7 - 4,8%, turun dari 4,87% pada kuartal I. Sepanjang 2025, pertumbuhan diperkirakan berada di level 4,6 - 4,8%.
- Pengenaan tarif resiprokal sebesar 19% membuat Indonesia harus menanggung beban komitmen komersial senilai Rp368 triliun, termasuk pembelian 50 pesawat Boeing. Penerapan tarif resiprokal 19% akan memotong volume ekspor Indonesia ke pasar dunia kurang lebih 2,65%, sementara daya saing Indonesia tertinggal dari negara pesaing seperti Vietnam.
- Indeks Penjualan Riil hanya tumbuh 1,2% (separuh dari kuartal sebelumnya), Indeks Keyakinan Konsumen berkontraksi -5,1%, dan proporsi tabungan rumah tangga turun dari 16,6% menjadi 14,6%. PHK melonjak 27,7%, memaksa masyarakat menggerus tabungan untuk konsumsi dasar.
- Dengan sisa waktu kurang dari enam bulan, untuk mengejar target pertumbuhan minimal 5%, **pemerintah tidak bisa hanya bekerja sebagaimana biasanya (*business as usual*)**, tetapi perlu efektif mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah pada kuartal tiga dan empat.

**Ekonomi Indonesia masih terjebak dalam pusaran ketidakpastian global yang menguat.** Gejolak ini dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump dan eskalasi ketegangan geopolitik di Selat Hormuz yang memuncak pada 13 – 24 Juni 2025, memaksa direvisinya proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 ke arah yang lebih pesimis. Indonesia telah menyepakati tarif resiprokal AS sebesar 19% terendah di antara negara ASEAN namun tetap lebih tinggi dari tarif yang sudah eksis. Yang lebih mengkhawatirkan, penerapan tarif serupa ke mitra dagang utama seperti Tiongkok akan menciptakan efek domino yang mengguncang stabilitas ekonomi Indonesia.

**Di tengah turbulensi global, kinerja ekonomi domestik kuartal II 2025 belum menunjukkan sinyal pemulihan yang meyakinkan.** Indikator konsumsi rumah tangga mengungkap realitas pahit: mayoritas masyarakat Indonesia masih mengerem belanja non-esensial akibat terpengkasnya *disposable income*. Investasi pun diperkirakan belum pulih signifikan karena efektivitas kebijakan pemerintah yang masih dipertanyakan dan preferensi investor global yang belum membaik. Bahkan belanja pemerintah diprediksi berkontraksi karena berbagai program prioritas belum berjalan optimal.



**CORE memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 akan berada di kisaran 4,7 – 4,8%**, mencerminkan perlambatan dibandingkan realisasi triwulan I sebesar 4,87%. Perlambatan ini dipicu oleh trilogi masalah mulai dari konsumsi rumah tangga yang terus melemah, kontraksi belanja pemerintah, hingga pertumbuhan investasi yang masih lamban. Sementara itu, untuk keseluruhan tahun 2025, pertumbuhan diperkirakan tetap bertahan di level 4,6 – 4,8% konsisten di bawah 5% sebagaimana proyeksi CORE pada April lalu.

**Momentum pemulihan ekonomi kini bertumpu pada keberanian pemerintah mengambil langkah-langkah terobosan.** Jika pemerintah tetap beroperasi dengan pendekatan *business as usual*, risiko ekonomi Indonesia terperosok lebih dalam di dalam enam bulan mendatang bukanlah skenario yang mustahil.

## Kegagalan Negosiasi Tarif

**Eskalasi perang dagang Trump sejak April 2025 memicu ketidakpastian ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya.** Ketegangan tarif resiprokal yang dimulai awal April mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. *International Monetary Fund* (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan global untuk tahun 2025 menjadi 2,8% pada April turun drastis dari prediksi Januari sebesar 3,3%. Ironisnya, angka April ini belum memperhitungkan dampak penuh perang dagang Trump.

**Pemerintah gagal dalam melakukan negosiasi tarif** meskipun Indonesia mengumumkan kesepakatan tarif resiprokal sebesar 19% untuk ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat (AS). Kesepakatan negosiasi yang oleh pemerintah Indonesia disebut sebagai hasil dari *“exceptional struggle”* ini harus dibayar mahal (Tabel 1). Jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya, penerapan tarif resiprokal dapat mendorong peningkatan tarif secara signifikan. Misalnya, untuk produk tekstil, tarif dapat meningkat hingga 30%, yang terdiri dari tarif dasar sebesar 11% ditambah tarif resiprokal sebesar 19%. Di saat yang bersamaan Indonesia melakukan penghapusan kebijakan hambatan non-tarif (*non-tariff measures*), termasuk penghapusan kewajiban TKDN, lisensi, pelabelan, pemeriksaan atau verifikasi pra-pengiriman untuk produk ekspor AS. Tidak berhenti di situ, Indonesia juga harus menyepakati pembelian beberapa produk AS: pembelian produk pertanian AS senilai USD 4,5 miliar (Rp 72 triliun, asumsi kurs Rp 16.000), pembelian 50 pesawat Jet Boeing 777 senilai 3,5 miliar (Rp 56 triliun), dan pembelian minyak mentah dan LPG senilai USD 15 miliar (Rp 240 triliun). Total komitmen komersial ini mencapai kurang lebih Rp 368 triliun.



*Penerapan tarif resiprokal juga dapat mendorong peningkatan tarif secara signifikan. Misalnya, untuk produk tekstil, tarif dapat meningkat hingga 30%, yang terdiri dari tarif dasar sebesar 11% ditambah tarif resiprokal sebesar 19%.*

	Indonesia	Vietnam
Tarif resiprokal sebelum negosiasi	32%	46%
Tarif resiprokal paska negosiasi	19%	20%
Besaran tarif yang berlaku ( <i>existing tariffs</i> ) untuk 20 produk utama yang diekspor ke AS (HS 2 digit)	0-14%	0-14%
Komitmen kepada AS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indonesia akan menghapus 99% hambatan tarif untuk seluruh produk industri dan pertanian AS yang diekspor ke Indonesia.</li> <li>Menghapus hampir semua kebijakan <i>non-tarif</i> meausures untuk produk AS yang diekspor ke Indonesia. Termasuk mengecualikan kewajiban TKDN, lisensi, pelabelan, pemeriksaan atau verifikasi <i>pra</i>-pengiriman barang.</li> <li>Mengecualikan produk pangan dan pertanian AS dari semua jenis perizinan impor.</li> <li>Dalam perdagangan jasa dan investasi digital, Indonesia akan memberikan kepastian mengenai diperbolehkannya transfer data pribadi ke AS.</li> <li>Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor komoditas ke AS, utamanya <i>critical minerals</i>.</li> <li>Indonesia akan meningkatkan impor produk pertanian senilai USD 4,5 miliar (kedelai, gandum, katun).</li> <li>Indonesia akan meningkatkan impor energi senilai USD 15 miliar (LPG, minyak mentah, bensin).</li> <li>Indonesia akan membeli 50 pesawat jet Boeing 777 senilai USD 3,2 miliar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif 0% untuk produk AS yang ekspor ke Vietnam.</li> <li>Akses produk industri mobil AS ke pasar Vietnam, termasuk kendaraan bermesin besar (<i>large-engine vehicles</i>).</li> <li>Tarif 40% untuk produk "transshipment"</li> </ul>
Pangsa pasar ekspor ke AS terhadap total ekspor negara (%)	10%	29%

Sumber: Whitehouse.gov; Trademap; The Straits Times

**Tabel 1. Perbandingan Tarif dan Komitmen Indonesia dan Vietnam Kepada AS**  
**Catatan: Data per 23 Juli 2025.**

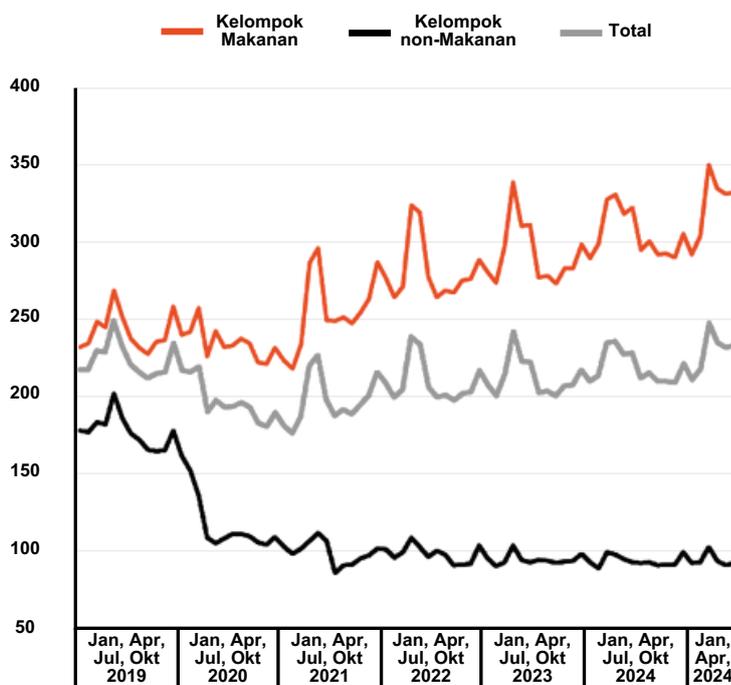
CORE mensimulasikan bahwa penerapan tarif resiprokal 19% akan memotong volume ekspor Indonesia ke pasar dunia kurang lebih 2,65%. Namun, dalam skenario kami, potensi menurunnya ekspor ini bisa dikompensasi jika Indonesia bisa mendiversifikasi pasar ke anggota-anggota BRICS. Selain itu, akibat tarif resiprokal 19%, ada potensi menurunnya surplus ekonomi di Indonesia sebesar USD 3,16 milyar. Penurunan surplus ekonomi adalah eksese dari jatuhnya konsumsi produk Indonesia di pasar AS, yang mengurangi surplus produsen Indonesia, utamanya industri dengan tujuan ekspor pasar AS.

**CORE menilai, meski Indonesia dikenai tarif resiprokal 19% (sejauh ini adalah tarif yang terendah bersama Filipina di antara negara rekan dagang AS di ASEAN), daya saing produk ekspor Indonesia ke pasar AS relatif lebih rendah terutama jika dibandingkan dengan Vietnam.** *Pertama*, perbedaan tarif resiprokal Indonesia dan Vietnam hanya 1%, yang mana Vietnam dikenai tarif 20%. *Kedua*, banyak produk ekspor Vietnam yang memiliki nilai *Revealed Comparative Advantage* (RCA) lebih bagus daripada Indonesia. Sebagai contoh, nilai RCA produk alas kaki dan mesin listrik Indonesia, produk unggulan ekspor kita ke AS, masing-masing adalah 2.3 dan 1.2, sementara Vietnam mencapai 3,0 dan 1,5. Dalam hal ini, semakin tinggi nilai RCA, semakin kompetitif produk suatu negara tersebut di pasar global. Selain itu, biaya produksi industri tekstil di Vietnam juga lebih rendah ketimbang di Indonesia karena biaya tenaga kerja di Vietnam yang lebih murah. Dalam konteks seperti ini, tarif 19% tidak serta merta berita bagus bagi produk utama ekspor Indonesia di pasar AS. Celakanya lagi, Indonesia perlu menanggung biaya tambahan atas komitmen komersial dengan AS.

## Daya Ungkit Konsumsi Rumah Tangga Masih Rendah

**Kelesuan konsumsi rumah tangga berlanjut di kuartal II 2025, meneruskan tren pelemahan yang telah dimulai sejak awal tahun.** Beberapa indikator bahkan menunjukkan pelemahan lebih dalam pada periode April-Juni. Melemahnya konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2025 jika dibandingkan dengan triwulan I 2025 (tahunan), tercermin dari melambatnya pertumbuhan tahunan indeks penjualan riil (IPR). Pada triwulan II 2025, IPR diproyeksikan hanya tumbuh 1,2% (tahunan). Angka proyeksi ini separuh dari laju IPR pada Januari-Maret 2025 (2,8%). Di sisi lain, meski pertumbuhan IPR pada kuartal II 2025 lebih tinggi 1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, rendahnya IPR pada triwulan II 2025 adalah alarm bagi konsumsi rumah tangga.

Data IPR berdasarkan kategori menunjukkan pola yang berbeda sejak 2019, konsumsi non-makanan terus menurun, sementara pengeluaran makanan konsisten tumbuh (Grafik 1). Pada triwulan II 2025, bahkan, di saat banyak momen liburan, konsumsi non-makanan masyarakat justru berada di bawah indeks 100, yang artinya pesimis. Perlambatan konsumsi non-makanan ini sejalan dengan jatuhnya pertumbuhan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Pada Triwulan II 2025, IKK berkontraksi -5,1% (tahunan), padahal pada Januari-Maret masih tumbuh 0,7% (tahunan). Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), yang mencerminkan kondisi terkini rumah tangga di Indonesia, tergunting -6,1% secara tahunan pada triwulan II 2025, jauh lebih dalam dari -0,6% pada triwulan sebelumnya tahun ini.



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 1. Indeks Penjualan Riil Makanan dan Non-Makanan**

**Melemahnya konsumsi non-makanan pada periode April-Juni 2025 adalah sebuah anomali karna terjadi di saat banyak hari libur.** Hal ini tercermin dari menurunnya jumlah penumpang transportasi umum, seperti kereta api dan pesawat terbang. Pada kuartal IV 2024, jumlah penumpang pesawat terbang tersungkur -42,08% (tahunan), dan penumpang kereta api melambat di level 9,42% pada kuartal I 2025, jauh di bawah pertumbuhan penumpang pada 2024, yang rata-ratanya mencapai 35,9% (tahunan). Sementara penumpang kapal laut, meski tumbuh positif pada kuartal I 2025 (7,37%), angkanya jauh di bawah kuartal I 2024 (29,42%).

Di sisi lain, tingkat okupansi kamar hotel berbintang juga menurun drastis pada kuartal I 2025 dan diperkirakan terus merosot pada kuartal II 2025. Pada kuartal I 2025, pertumbuhan okupansi hotel berkontraksi -0,07% (tahunan). Ini adalah kontraksi untuk pertama kalinya sejak Covid, yang menunjukkan kecenderungan wisatawan memilih penginapan dengan harga lebih murah untuk memangkas biaya *travelling*. Selain konsumsi perjalanan atau wisata, rumah tangga Indonesia juga tampak menunda rencana pembelian rumah, khususnya rumah tipe menengah dan rumah tipe besar. Pada kuartal I 2025, pertumbuhan penjualan kedua tipe rumah tersebut masing-masing berkontraksi -35,76% dan -11,69%.

Di sisi lain, terhimpitnya rumah tangga Indonesia juga tercermin dari pendapatan yang diterima. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja merosot drastis pada kuartal I 2025, dan lebih dalam lagi sepanjang April-Juni 2025. Pada kedua periode tersebut, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja terpangkas masing-masing -7,7% dan -13,8% secara tahunan. Hal ini juga sejalan dengan jumlah PHK yang meningkat 27,7% periode Januari - April dari tahun sebelumnya (Kemnaker, 2025). Kontraksi pada indeks ini mencerminkan minimnya pendapatan masyarakat untuk mendorong konsumsi. Minimnya pendapatan masyarakat ini terbukti oleh tren pertumbuhan upah riil yang belum pulih ke level sebelum Covid. Pada Februari 2025, pertumbuhan upah riil mencapai 1,9% (tahunan), masih lebih rendah dari pertumbuhan pada 2019 yang mencapai 2,5%.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga mengonfirmasi seretnya pendapatan masyarakat. Hal ini tercermin dari terpangkasnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk tabungan (*saving*). Proporsi tabungan pada kuartal II 2025 mencapai 14,6% dari total alokasi *spending* rumah tangga, atau menurun dari 16,6% pada periode yang sama tahun lalu. Sementara proporsi konsumsi meningkat 1,2% pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan, **masyarakat terpaksa menggerus tabungan untuk mendorong konsumsi makanan utamanya untuk rumah tangga menengah ke bawah.**

Rata-rata nominal tabungan (dana pihak ketiga) pada akun rekening perbankan di bawah Rp 100 juta mengkonfirmasi fenomena *makan tabungan* kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pada kuartal II 2025, rata-rata nominal tabungan rekening di bawah Rp 100 juta menurun sebesar -2,4% (tahunan). Tak hanya itu, kelompok rumah tangga dengan akun rekening Rp 100 juta - Rp 1 miliar pun nominalnya berkontraksi -0,23% pada periode yang sama.

Melemahnya konsumsi rumah tangga juga dicerminkan oleh lebih rendahnya inflasi umum pada triwulan II 2025. Rendahnya inflasi umum ini selain dipengaruhi oleh tren harga pangan yang relatif landai, juga dipengaruhi oleh lemahnya tarikan permintaan dari rumah tangga masyarakat. Sepanjang April hingga Juni, inflasi umum berada di kisaran 1,6 - 1,95% (tahunan), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,51 - 3% (tahunan). Sementara itu, paket stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah hanya sebesar 0,8% dari total PDB konsumsi Indonesia pada kuartal I 2025 dengan masa berlaku yang hanya 2 bulan (Juni - Juli). Kondisi ini diperparah dengan dibatalkannya stimulus diskon tarif listrik, padahal biaya listrik menyerap rata-rata 10% total pengeluaran rumah tangga Indonesia.

Dari sisi ketenagakerjaan, himpitan terhadap rumah tangga Indonesia juga tercermin dari minimnya ketersediaan lapangan kerja yang layak. Sepanjang Januari - April 2025, Kemnaker mencatat terjadi lonjakan PHK sebesar 27,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, atau PHK meningkat dari 18.829 pekerja pada Januari-April 2024, menjadi 24.036 pada Januari - April 2025.

Di sisi lain, sebanyak 11,1 juta orang yang bekerja di sektor informal kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan layak pasca pandemi dalam rentang periode Februari 2020 – Februari 2025. **Dengan minimnya kesempatan kerja yang layak, wajar jika rumah tangga masyarakat mengerem konsumsi non-esensial, dan pada saat yang sama seretnya pendapatan telah memaksa masyarakat menengah ke bawah menggerus tabungan.**

## Permasalahan Institusi dan Situasi Domestik Menghambat Pemulihan Investasi

Pemulihan investasi pada kuartal II 2025 diperkirakan masih akan tertahan. CORE menilai, tertahannya pemulihan investasi pada kuartal II 2025 disebabkan oleh kebijakan tarif Trump yang mendorong ketidakpastian global yang berdampak pada arus investasi langsung dunia. Pada saat yang sama, buruknya efektivitas kebijakan pemerintah di dalam negeri telah menyebabkan sektor swasta yang mengantongi 88% total aktivitas investasi (PMTB) mengalami tekanan signifikan. **Karena itu, CORE memperkirakan bahwa investasi pada kuartal II 2025 secara tahunan masih akan lebih rendah dari pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 4,42% tetapi akan sedikit lebih baik dibandingkan kuartal I 2025 (2,12%).**

Dinamika kebijakan tarif resiprokal Trump dan serangkaian gejolak geopolitik yang terjadi di Timur Tengah seperti konflik Israel-Iran (13 Juni - 24 Juni), tidak bisa dimungkiri telah menimbulkan kekhawatiran investor, sehingga mendorong arus investasi langsung dunia melemah. Pada 2024, aliran investasi langsung merosot 11% (UNCTAD 2025). Sedang pada 2025, aliran investasi langsung diprediksi akan semakin melemah akibat eskalasi tarif resiprokal Trump dan gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kendati demikian, aliran investasi langsung ke ASEAN cenderung meningkat, dan pada saat yang sama cenderung keluar dari Tiongkok. Pada 2024, aliran investasi langsung ke ASEAN naik 38% dari 2019, sementara aliran ke Tiongkok berkontraksi 17,7%. Kendati demikian, Indonesia hanya memperoleh limpahan 10% dari total investasi langsung yang mengalir ke ASEAN.

Saat bersamaan, dengan tensi perang dagang yang masih dinamis antara AS dan Tiongkok, relokasi investasi perusahaan-perusahaan global yang beroperasi di Tiongkok semakin kuat. Berbagai survei menunjukkan, perusahaan global yang beroperasi di Tiongkok cenderung memilih atau berencana memindahkan perusahaannya ke negara-negara ASEAN (AmCham China 2025; Jetro 2025). Namun demikian, **Indonesia masih belum menjadi preferensi utama investor, salah satu alasannya adalah tidak mudahnya mengakses tenaga kerja berkualitas (*skilled labour*) dan ketidakpastian kebijakan pemerintah untuk mendorong perbaikan iklim investasi di dalam negeri.**

Secara spesifik, selain kebijakan efisiensi anggaran, serangkaian kebijakan lainnya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo belum berhasil meyakinkan kepercayaan investor secara umum. Perilaku investor ini sudah terlihat dari pergerakan investasi portofolio yang berkontraksi tajam khususnya pada saat diumumkannya kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan setelah pernyataan pemerintah dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan AS juga sejauh ini belum mampu mengerek kepercayaan investor.

Prospek daya saing investasi di Indonesia juga berpotensi memburuk akibat mengendurnya efektivitas pengelolaan kebijakan pemerintah dan terhimpitnya sektor swasta. Peringkat *government efficiency* Indonesia, salah satu indikator daya saing global, merosot dari peringkat 23 pada 2024, menjadi peringkat 34 pada 2025 (IMD 2025). Merosotnya efisiensi kebijakan pemerintah disebabkan oleh lemahnya *good governance* sepanjang semester 1 2025, yang kemungkinan besar adalah akibat kebijakan pemangkasan anggaran dan reorientasi program prioritas pemerintah yang cenderung gegabah, dan secara khusus reorientasi program investasi ke sektor non-infrastruktur yang implementasinya masih centang perenang. Imbasnya, nilai investasi bangunan yang mencakup 74% total PMTB di Indonesia jatuh di level 1,35% (tahunan), jauh lebih rendah dari kuartal satu dan dua 2024, yang masing-masing melesat 5,46% dan 5,31%. Pada saat yang sama, serangkaian kebijakan yang melemahkan investasi di dalam negeri tersebut, berimbas pada turunnya ranking *business efficiency* dari peringkat 14 pada 2024, ke peringkat 26 pada 2025. Secara umum, hal ini melemahkan daya saing investasi Indonesia di level global dan regional ASEAN. Hal ini terbukti, perusahaan-perusahaan Jepang global cenderung memilih Vietnam dan Thailand ketimbang Indonesia (Jetro 2025).

## Seretnya Belanja Pemerintah di Tengah Risiko Tarif Trump

**Serapan belanja strategis masih rendah meskipun *keran* efisiensi telah dibuka.** Hingga April 2025, realisasi efisiensi belanja baru mencapai 28,2% dari target, sementara belanja barang dan bantuan sosial masing-masing baru terealisasi sebesar 20% dan 32,6%. Angka ini menunjukkan bahwa fungsi fiskal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi belum bekerja optimal. Lemahnya serapan belanja strategis mencerminkan ketidaksiapan birokrasi dalam mengeksekusi anggaran. Berbagai hambatan teknis seperti minimnya insentif kinerja, prosedur pencairan yang berbelit, serta keterbatasan kapasitas teknis menjadi faktor utama terjadinya *bottleneck* yang sistemik.

**Kinerja program prioritas nasional juga menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.** Realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya mencapai 7% dari total alokasi Rp71 triliun, disertai masalah pelaksanaan seperti laporan keracunan makanan dan keterlambatan pembayaran vendor. Program koperasi Merah Putih pun menghadapi kritik luas akibat desain yang tidak matang dan lemahnya kesiapan kelembagaan.

**Lambatnya serapan anggaran di daerah memperburuk catatan belanja pemerintah.** Pertumbuhan realisasi belanja pemerintah daerah sampai dengan semester I-2025 melambat hingga -20% jauh menurun dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 41%, bahkan belanja pegawai yang bersifat wajib dan rigid juga mencatatkan penurunan hingga -6%.

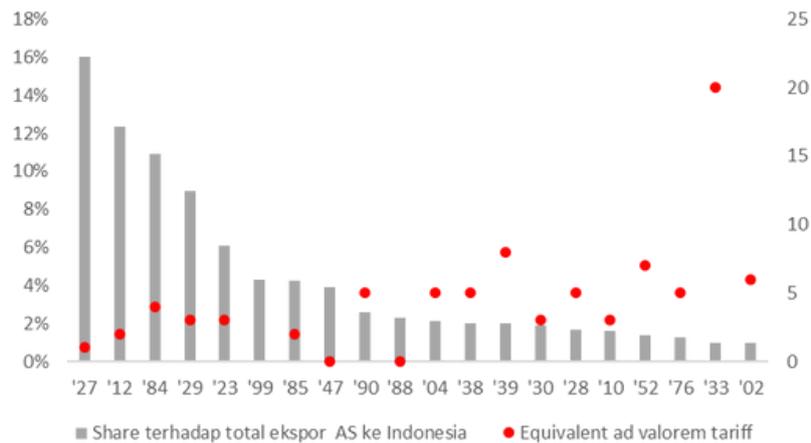
Fenomena ini mengindikasikan gangguan struktural dalam sistem fiskal daerah, mulai dari keterlambatan transfer pusat, lemahnya tata kelola anggaran, hingga pengaruh politik lokal seperti Pilkada yang menyebabkan sikap *wait-and-see* dalam pengambilan keputusan. Keterlambatan petunjuk teknis (juknis) dan kurangnya integrasi dalam sistem penganggaran pusat-daerah membuat anggaran daerah tidak cukup adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi lokal. Fragmentasi ini secara langsung mengurangi efektivitas fiskal sebagai instrumen stabilisasi di tingkat nasional.

Sementara itu, kondisi perekonomian menekan penerimaan negara. Secara keseluruhan pertumbuhan penerimaan perpajakan sampai Juni mengalami perlambatan hingga -19%. Penerimaan dari PPN dan PPnBM mengalami penurunan tajam hingga -15%, dan PPh non-migas turun sebesar -5,4%. Kondisi ini juga selaras dengan indikator utama seperti konsumsi rumah tangga dan investasi yang mengalami perlambatan di kuartal kedua. Jika tren pertumbuhan perpajakan tetap berada di kisaran rata-rata 10%, maka realisasi penerimaan pajak diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp2.320 triliun lebih rendah dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.387 triliun.

**Ke depan, penerimaan negara juga berpotensi terdistorsi kebijakan tarif Trump yang mengancam sektor-sektor penyumbang pajak utama.** Implementasi tarif ini akan berdampak langsung pada industri pengolahan yang berkontribusi 26% dari total lapangan usaha penyumbang pajak terbesar. Sektor ekspor unggulan Indonesia ke AS seperti elektronik dan mesin elektrik, tekstil dan produk garmen, serta karet dan produk turunannya akan menghadapi tekanan yang tentu akan mempengaruhi setoran penerimaan pajak dari sektor manufaktur. Di saat yang bersamaan, meski beberapa barang dari AS seperti energi, pangan, dan bahan baku industri dikenakan tarif bea masuk yang relatif rendah (grafik 2) namun **kebijakan bea masuk 0% tetap berpotensi menghilangkan penerimaan di kisaran 389 juta USD.**

**Di tengah tekanan tersebut, perlu pula dicermati rencana pembelian pesawat dalam perjanjian perdagangan dengan AS.** Jika tidak diantisipasi secara cermat, bukan tidak mungkin beban anggaran negara kembali meningkat mengulang pola seperti proyek kereta cepat yang pada akhirnya didanai oleh APBN. Dengan tekanan terhadap penerimaan yang semakin nyata akibat kebijakan tarif, kewaspadaan terhadap komitmen belanja yang bersifat *multi-year* menjadi semakin penting dalam menjaga ruang fiskal yang sehat.

Lebih jauh, tekanan pada sisi penerimaan tersebut turut memperbesar risiko pelebaran defisit anggaran. Dalam skenario terburuk, defisit berpotensi melebar hingga melebihi 2,78% dari PDB, melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBN. Kondisi ini tidak hanya menantang dari sisi fiskal, tetapi juga berisiko menimbulkan tekanan pada nilai tukar, mendorong kenaikan biaya utang, dan menyempitkan ruang kebijakan yang dibutuhkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi ke depan.



Sumber: Trademap

**Grafik 2. Share Ekspor AS ke Indonesia dan Tarif yang berlaku**

Dengan struktur penerimaan yang tidak *resilient*, kemampuan negara dalam merespons tekanan fiskal menjadi sangat terbatas. Tekanan pada pembiayaan dan meningkatnya risiko fiskal memperkuat sinyal ketidakstabilan jangka menengah. Pada kuartal I-2025, total utang pemerintah mencapai Rp9.108 triliun, tumbuh 10,2% dibanding periode yang sama tahun lalu. Hal yang mengkhawatirkan, terjadi pergeseran preferensi investor ke SBN jangka pendek (tenor 1–3 tahun meningkat dari 15,7% menjadi 22,4%), menandakan berkurangnya kepercayaan terhadap stabilitas fiskal jangka menengah. Ketergantungan pada intervensi Bank Indonesia untuk menjaga pasar obligasi makin menambah pertanyaan soal keberlanjutan strategi pembiayaan. Tanpa kejelasan arah komunikasi fiskal dan perbaikan kredibilitas kebijakan, risiko pembiayaan ulang (*rollover risk*) dan tekanan terhadap reputasi fiskal akan semakin membesar, mempersempit ruang gerak kebijakan pada masa mendatang.

## Dilema Kebijakan Moneter

**Ketidakpastian global semakin menguat dan menciptakan tantangan baru bagi stabilitas ekonomi dunia.** Peningkatan risiko tercermin dari lonjakan *Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) Index* yang mencapai level tertinggi, disertai kembali meningkatnya inflasi di negara besar seperti Amerika Serikat, Euro Area, Jepang, Inggris, dan Tiongkok. Kondisi ini memicu divergensi kebijakan moneter global, di mana The Fed mempertahankan suku bunga tinggi 4,5% sementara Bank Indonesia memangkas BI Rate pada 5,25%.

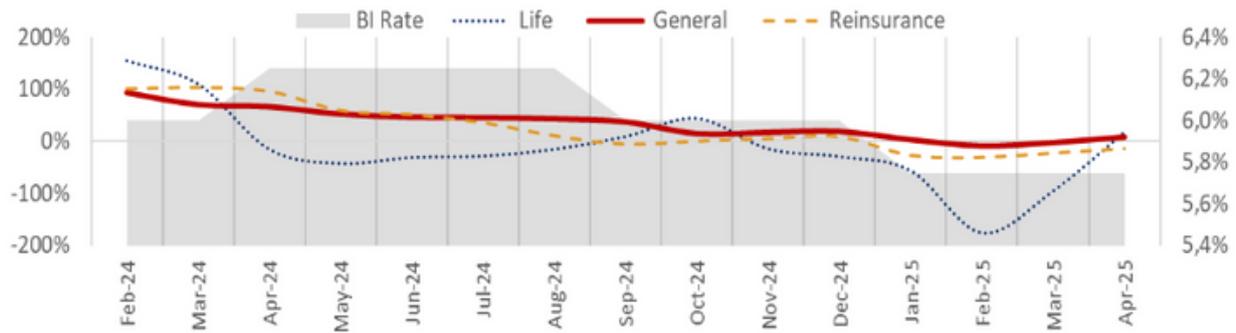
**Dalam konteks tersebut, langkah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan justru memicu tekanan pada pasar keuangan domestik.** Keputusan BI melakukan penyesuaian suku bunga mengakibatkan derasnya *capital outflow*. Meski IHSG dan *yield obligasi 10 tahun* kembali menguat setelah terpuruk, pada kuartal kedua 2025 tercatat *net outflow* sebesar -42,16 yang didominasi *outflow SBI/SRBI*.

**Meski menghadapi tekanan *capital outflow*, stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga melalui intervensi aktif Bank Indonesia.** BI mempertahankan stabilitas rupiah melalui *Non-Deliverable Forward (NDF)* dan *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)*. Kestabilan ini didukung peningkatan Utang Luar Negeri sebesar 14% dan cadangan devisa BI sebesar USD 153 miliar untuk mengimbangi *capital outflow*.

**Era suku bunga tinggi berdampak pada performa sektor perbankan nasional.** Kondisi ini memicu melemahnya pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga, berakibat pada perlambatan uang beredar dan tekanan *disinflationary*. Penurunan pertumbuhan M2 menyebabkan penyempitan *Loan-to-Deposit Ratio*, dengan proporsi *undisbursed loan* mencapai 29,8% menunjukkan pelaku usaha masih *wait and see* untuk ekspansi.

**Tekanan perbankan berdampak signifikan pada sektor UMKM yang mengalami kondisi semakin berat.** Pertumbuhan kredit UMKM hanya 2,17% *year-on-year* pada Mei 2025, dengan proporsi terhadap total kredit turun menjadi 18,76%. *Non-Performing Loan (NPL)* UMKM naik menjadi 4,49%, dengan sektor konstruksi mencatat NPL tertinggi 10,0%.

**Sebagai dampak lanjutan, industri asuransi kredit ikut merasakan tekanan substansial.** Suku bunga tinggi memperburuk kualitas kredit, mengakibatkan *loss ratio* asuransi kredit melonjak menjadi 90% pada 2025. BI merespons dengan menurunkan BI Rate bertahap dari 5,50% (Mei) menjadi 5,25% (Juli 2025), namun penurunan ini berdampak pada hasil investasi perusahaan asuransi yang menurun berkala.



**Grafik 3. BI Rate dan Hasil Investasi Perusahaan Asuransi**

**Proyeksi sektor moneter dan keuangan Indonesia pada kuartal III 2025** mencerminkan tekanan eksternal yang tinggi namun tetap ditopang oleh ketahanan domestik. Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp16.000 – Rp16.700 per dollar AS, seiring ketidakpastian global akibat kebijakan tarif 19% dari AS dan potensi *capital outflow*. Meskipun demikian, stabilitas domestik seperti inflasi yang terjaga, cadangan devisa yang kuat, serta intervensi aktif Bank Indonesia tetap menjadi penyangga utama. Arah kebijakan moneter diperkirakan tetap *pro-growth but cautious*, dengan BI Rate diproyeksikan berada di level 5,5% pada akhir kuartal III dan naik moderat menjadi 5,75% di akhir tahun, guna menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan kredit diperkirakan melambat ke kisaran 7% – 9% akibat pelemahan konsumsi, suku bunga yang relatif tinggi, serta sikap hati-hati perbankan dalam menghadapi divergensi kebijakan moneter global.

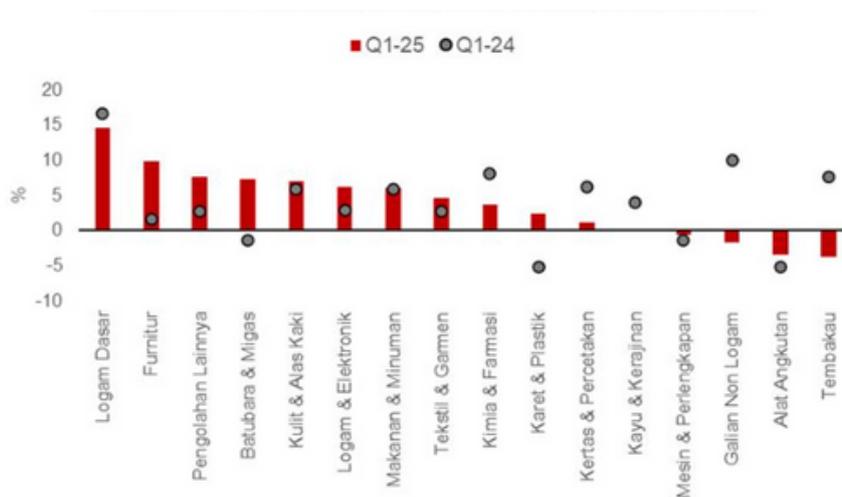
**Kesepakatan dagang historis antara Amerika Serikat dan Indonesia yang diumumkan pada Juli 2025 berpotensi membawa dampak strategis bagi sektor jasa keuangan Indonesia.** Meskipun tidak secara langsung menysasar sektor keuangan, perjanjian ini mencakup liberalisasi perdagangan digital, perlindungan data lintas batas, dan penghapusan hambatan non-tarif yang dapat membuka jalan masuknya pemain keuangan digital global ke Indonesia. Otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia dihadapkan pada tekanan untuk menyelaraskan regulasi perlindungan data dan kepatuhan internasional, sekaligus menjaga stabilitas eksternal di tengah potensi lonjakan impor. Di sisi lain, pelaku jasa keuangan nasional memiliki peluang besar untuk memperluas layanan pembiayaan perdagangan, asuransi, dan investasi lintas negara, namun perlu meningkatkan daya saing digital serta tata kelola berbasis ESG agar tidak tergerus oleh dominasi pemain global.

## Insight Sektor Strategis

### MANUFAKTUR

Sektor manufaktur Indonesia tersandung dilema: momentum positif pada kuartal I yang rapuh dan ancaman perlambatan struktural di tengah gejolak global yang menguat. Meski pertumbuhan manufaktur pada kuartal I 2025 mencapai 4,55%, melampaui realisasi periode yang sama tahun lalu (4,13%) namun melambat dari kuartal IV 2024 (4,89%). Euforia sesaat ini lebih mencerminkan dorongan musiman ketimbang pemulihan fundamental yang berkelanjutan.

Dinamika sektoral kuartal I 2025 mengungkap ketimpangan kinerja yang mengkhawatirkan. Subsektor makanan-minuman berhasil mengakselerasi pertumbuhan menjadi 6,04% dari 5,87% pada tahun sebelumnya, didorong konsumsi Ramadhan dan Lebaran yang melonjak. Tekstil dan garmen pun mencatatkan lompatan signifikan ke level 6,04% dari kontraksi 2,64% pada tahun sebelumnya. Sementara kulit-alas kaki juga mengalami peningkatan menjadi 6,95% dari 5,9% tahun lalu. Namun, sektor strategis lainnya justru menunjukkan sinyal pelemahan: logam dasar melambat ke 14,47% dari 16,57%, dan yang lebih mengkhawatirkan, mesin-perengkapan terkontraksi -0,65%.



Sumber: BPS

Grafik 4. Pertumbuhan Tahunan PDB Menurut Subsektor Manufaktur

Realitas pahit mulai terkuak ketika dorongan musiman menghilang. Subsektor makanan-minuman yang menyumbang 7,2% terhadap PDB dan penyerap 4,39% tenaga kerja nasional diperkirakan akan mengalami perlambatan tajam pada kuartal II 2025 seiring berakhirnya momentum konsumsi yang bertepatan dengan hari raya keagamaan. Lebih mengkhawatirkan, serangkaian indikator utama menunjukkan manufaktur Indonesia sedang memasuki fase kontraksi yang sistemik.

**Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia** terjerembab dari 47,4 pada Mei menjadi 46,9 pada Juni 2025, menandakan kontraksi akibat melemahnya permintaan ekspor dan domestik yang diperparah ketidakpastian regulasi pemerintah. PMI versi Bank Indonesia pun merosot menjadi 50,89 pada Kuartal II 2025 dari 51,67 pada kuartal sebelumnya. Meski masih ekspansif, namun hampir seluruh komponennya menurun: volume pesanan anjlok 1,84 poin, penerimaan input turun 0,28 poin, persediaan turun 1,36 poin, dan penyerapan tenaga kerja menurun 1,74 poin.

**Indeks Kepercayaan Industri (IKI)** ikut menurun dari 52,11 pada Mei menjadi 51,84 pada Juni, meski komponen pesanan (54,21) dan persediaan (53,70) masih bertahan di zona ekspansif. Erosi kepercayaan industri ini tak lepas dari badai ketidakpastian global, khususnya konflik di Timur Tengah yang mengguncang stabilitas rantai pasok global.

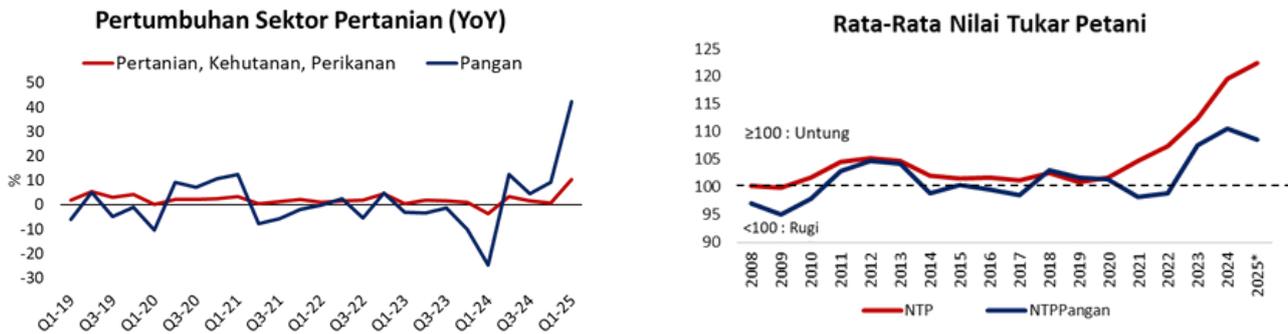
**Perlambatan industri manufaktur berpotensi menciptakan efek domino yang negatif.** Sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi 19,25% terhadap PDB Indonesia, sektor ini menyerap 13,4% tenaga kerja nasional, menjadikannya sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar ketiga setelah sektor pertanian-kehutanan-perikanan (28,5%) dan perdagangan besar eceran (19,3%). Kontraksi di sektor industri manufaktur berpotensi menghantam jutaan pekerja dan memperburuk daya beli masyarakat yang sejauh ini sudah terhimpit.

**Dalam pusaran ketidakpastian ini, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan protektif yang berpotensi menjadi katalis pemulihan.** Perpres No. 46/2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengubah dari sistem penalti menjadi insentif, mewajibkan pemerintah, BUMN, dan BUMD memprioritaskan produk ber-TKDN dan PDN. Paralel dengan ini, revisi Permendag No. 8/2024 yang dipecah menjadi sembilan aturan baru bertujuan membentengi pasar domestik dari serbuan impor murah yang merusak daya saing industri lokal.

Langkah strategis lainnya adalah **relokasi pelabuhan masuk impor untuk produk elektronik, tekstil, dan kosmetik ke Sorong, Bitung, dan Kupang sebagai upaya sistematis mengurangi banjir barang impor berkualitas rendah** yang selama ini menggerogoti industri domestik. Meski demikian, efektivitas kebijakan-kebijakan ini sangat bergantung pada eksekusi yang konsisten dan monitoring ketat agar tidak melahirkan birokrasi baru yang justru menghambat daya saing industri nasional.

## PERTANIAN

Kebijakan sektor pertanian Indonesia kini mulai menunjukkan arah perbaikan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan sektor pertanian mencapai 10,45% pada kuartal pertama 2025 dan indikator kesejahteraan petani meningkat setelah hampir dua dekade hidup di level yang marjinal. Tingginya pertumbuhan sektor pertanian ini sebagian besar disebabkan oleh efek dasar rendah pasca dampak El Niño 2024.



Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga petani menunjukkan tren perbaikan. Meningkatnya NTP didorong oleh kenaikan NTP di sektor perkebunan dari 149.4 pada Juni 2024 menjadi 158.01 pada Juni 2025. Ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas seperti Kopi, Kelapa, Kelapa sawit dan Karet. NTP sektor pangan pun menunjukkan tren perbaikan selama 1 semester 2025 setelah kebijakan penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500/kilogram di implementasikan. NTP pangan pada Juni 2024 mencapai 106, naik menjadi 109.24 per Juni 2025.

Penyesuaian harga GKP tidak hanya berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani pangan, namun juga memperkuat stok cadangan beras nasional (CBP) hingga level tertingginya. Stok cadangan beras pemerintah sebesar 4,2 juta ton pada Juli 2025, dimana 2,7 juta ton berasal dari penyerapan dalam negeri. Namun, dibalik berlimpahnya stok CBP, menyimpan sejumlah persoalan penumpukan stok di Gudang yang akan berdampak pada peningkatan biaya perawatan gudang dan logistik serta penurunan kualitas beras. Sementara disisi penyalurannya belum optimal. Realisasi penyaluran bantuan pangan baru sekitar 11,3 ribu ton dan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baru 181 ribu ton. Perlu ada upaya percepatan penyaluran beras CBP untuk stabilisasi harga di tengah kenaikan harga beras di konsumen dan menjelang panen raya kedua yang mulai berlangsung pada Agustus.

**Target ambisius peningkatan produksi beras menjadi 33,5 juta ton pada 2026 untuk mengurangi ketergantungan impor menyimpan konsekuensi acaman konversi lahan hutan.** Kebutuhan lahan yang masif untuk memenuhi target produksi menciptakan tekanan terhadap kawasan hutan yang tersisa, sehingga menimbulkan paradoks ekonomi antara pencapaian kedaulatan pangan dan pelestarian lingkungan yang dapat mengancam komitmen Indonesia terhadap konservasi hutan dan target pengurangan emisi karbon.

### ***Jebakan Komitmen Perdagangan Trump: Kontradiksi Swasembada***

**Di tengah retorika swasembada pangan, Indonesia justru terpaksa menerima komitmen pembelian produk pertanian AS senilai USD 4,5 miliar sebagai konsekuensi negosiasi penurunan tarif resiprokal Trump.** Ironi ini semakin mencolok ketika data harga komoditas menunjukkan bahwa produk AS tidak selalu menawarkan harga kompetitif: gandum Rusia (USD 228/MT) lebih murah dari AS (USD 233/MT), sementara jagung Argentina (USD 193/MT) jauh lebih ekonomis dibanding jagung AS (USD 194/MT).

**Komitmen pembelian kepada AS akan menutup peluang Indonesia mendapatkan suplier yang lebih efisien.** Padahal untuk jagung, Indonesia sebenarnya mengalami surplus dari produsen domestik, namun harga impor lebih murah akibat skala produksi masif dan subsidi yang diterima oleh petani AS. Dampak struktural kebijakan komitmen pembelian produk dari AS berpotensi mengancam petani lokal karena gempuran produk impor murah akan menekan harga domestik dan menggerus minat konsumen terhadap produk lokal.

**Yang lebih mengkhawatirkan, komitmen ini juga menciptakan kontradiksi fundamental antara retorika swasembada dengan realitas ketergantungan struktural terhadap impor AS.** Indonesia kehilangan fleksibilitas memilih suplier berdasarkan efisiensi harga dan terpaksa mengalokasikan devisa untuk produk yang tersedia lebih murah dari negara lain, sebuah distorsi ekonomi yang berpotensi merugikan kedaulatan pangan jangka panjang.

**Dalam pusaran kontradiksi ini, sektor pertanian Indonesia berada di persimpangan kritis:** momentum positif terancam terdistorsi oleh jebakan komitmen perdagangan yang justru menjauhkan Indonesia dari cita-cita swasembada pangan yang berkelanjutan.

## PERTAMBANGAN

**Sektor pertambangan Indonesia menghadapi ancaman fluktuasi harga nikel global,** tercermin dari pertumbuhan PDB yang terjerembab hingga -11,83 persen pada kuartal pertama 2025. Indonesia, yang memasok lebih dari 60% suplai nikel global, kini menghadapi dilema *oversupply* yang mengancam stabilitas industri. Ekspansi tambang dan *smelter* yang tak terkendali disinyalir telah menciptakan kelebihan pasokan global sehingga mengakibatkan harga nikel yang anjlok. Dengan demikian, saat ini beberapa *smelter* di Morowali, Halmahera, dan Teluk Weda terus mengerem produksi untuk mengantisipasi harga yang terus merosot. Di sisi lain berdasarkan data *International Energy Agency* (IEA), pasokan nikel dari Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh dan mendominasi hingga 72-74% pasokan nikel global pada 2040, sehingga berpotensi menciptakan *oversupply* yang lebih kronis apabila tidak diantisipasi dengan baik.

**Implementasi Standar ESG yang masih setengah hati.** Selain menghadapi tantangan stabilitas harga, industri pertambangan nikel Indonesia juga masih dihadapkan dengan persoalan penerapan standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang masih stagnan dan belum optimal. Kondisi ini mencerminkan paradoks, di mana potensi manfaat ekonomi yang diciptakan dari hilirisasi dan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global justru berpotensi memunculkan dampak lingkungan-sosial-tata kelola yang kompleks di tingkat lokal.

**Dalam menghadapi tantangan-tantangan pada industri nikel tersebut, pemerintah telah menunjukkan arah kebijakan yang strategis meskipun terkesan lambat.** Sebagai contoh, Proyek Strategis Nasional (PSN) ekosistem baterai listrik, sebagai salah satu rantai nilai nikel, senilai USD 5,9 miliar menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, meskipun *oversupply* nikel telah terjadi sejak 2023 dan fasilitas hilirisasi nikel tersebut dicanangkan baru akan beroperasi pada beberapa tahun mendatang. Selain itu, usulan standar ESG nasional untuk hilirisasi nikel disesuaikan dengan konteks lokal sedang dikembangkan dengan menggunakan referensi internasional, seperti *Initiative for Responsible Mining Assurance* (IRMA), *Responsible Mining Initiative* (RMI), dan standar lainnya, untuk meningkatkan kredibilitas nikel Indonesia di pasar global. Standar ESG nasional untuk nikel tersebut masih dalam tahap usulan dan pengembangan meski kebijakan hilirisasi nikel telah berjalan hingga lima tahun dan berbagai eksternalitas negatif telah dirasakan oleh pemangku kepentingan lokal.



*Selain menghadapi tantangan stabilitas harga, industri pertambangan nikel Indonesia juga masih dihadapkan dengan persoalan penerapan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang masih stagnan dan belum optimal.*

**Pemerintah Indonesia tengah melakukan revisi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan agar kembali ke periode tahunan, mundur dari sistem tiga tahunan.** Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidakseimbangan antara permintaan dan produksi serta mengendalikan harga nikel di tingkat global. Meski demikian, hal ini juga memicu kekhawatiran para pelaku usaha terhadap ketidakpastian regulasi dan volatilitas pasar yang tinggi.

**Di samping itu, UU Minerba 2025 yang disetujui DPR RI pada Februari 2025 untuk memperkuat tata kelola dan mendukung hilirisasi masih dinanti.** Begitu pula dengan berbagai komoditas pertambangan lainnya yang telah masuk ke dalam *shortlist* proyek hilirisasi yang akan memperoleh suntikan dana dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara seperti industri smelter aluminium (bauxit) di Mempawah, industri mangan-sulfat (mangan) di Kupang, industri modul surya terintegrasi (bauxit dan silika) di Kawasan Industri Batang, dan berbagai proyek lainnya. Berkaca dari pengalaman hilirisasi nikel sebelumnya, tanpa akselerasi implementasi standar ESG yang komprehensif dan strategi mitigasi *oversupply* yang terukur, sektor pertambangan Indonesia berisiko kehilangan momentum hilirisasi yang telah dibangun dengan nilai investasi yang tidak sedikit, sekaligus menghadapi tekanan akses pasar global yang semakin ketat terhadap produk mineral yang tidak memenuhi standar keberlanjutan, serta tantangan sosial-lingkungan di tingkat lokal yang semakin kompleks.

## PERDAGANGAN

**Sektor perdagangan Indonesia mencatatkan pertumbuhan 5,03% pada kuartal I-2025, melampaui capaian Kuartal I 2024 (4,58%).** Hanya saja melambat dari momentum kuartal IV 2024 (5,19%) di tengah gejolak transformasi struktural yang belum sepenuhnya terarah. Akselerasi ini lebih mencerminkan dorongan proteksionisme negara-negara tujuan ekspor dan dinamika regulasi domestik ketimbang pemulihan fundamental daya saing perdagangan nasional.

### ***Proteksionisme Regulasi: Solusi Jangka Pendek, Risiko Jangka Panjang***

**Transformasi kebijakan perdagangan ditandai pencabutan Permendag 8/2024 yang digantikan sembilan peraturan sektoral berdasarkan komoditas merupakan sebuah pergeseran paradigma menuju proteksionisme yang lebih sistematis.** Meski langkah ini memudahkan pengendalian arus impor dan berpotensi memperkuat posisi industri domestik, ancaman retaliasi dari mitra dagang dan distorsi harga pasar domestik tetap mengintai efektivitas strategi protektif ini.

**Paralel dengan kebijakan protektif, fenomena tutupnya retail modern mengungkap realitas pahit pergeseran konsumsi masyarakat yang telah beradaptasi dengan era digital.** Perubahan radikal pola belanja dari mall ke *platform online*, preferensi berbelanja dekat rumah, hingga meningkatnya *experiential shopping* menciptakan tekanan eksistensial bagi ritel konvensional. Namun, tantangan yang lebih mendasar tertuju pada melemahnya daya beli konsumen, maraknya *predatory pricing platform digital*, dan membengkaknya biaya operasional mulai dari sewa, listrik, SDM, hingga kompleksitas aksesibilitas.

**Di tengah urgensi transformasi digital, pemerintah justru menghadirkan kebijakan yang berpotensi kontraproduktif.** Rencana penggabungan Kantor Bea dan Cukai Perdagangan dalam satu sistem berisiko menciptakan *bottleneck* birokrasi yang menghambat kelancaran usaha dan menimbulkan persoalan hukum baru sebuah langkah mundur di era digitalisasi perdagangan.

**Kontradiksi kebijakan semakin mencolok dalam penerapan pajak *marketplace* untuk UMKM.** Meski Dirjen Pajak berhasil merancang skema pemotongan PPh final 0,5% dari peredaran bruto yang dapat menambah penerimaan negara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar, kebijakan ini menciptakan paradoks kebijakan fiskal yang mengkhawatirkan. Di satu sisi menambah penerimaan negara, namun di sisi lain memberatkan UMKM dengan beban administratif tambahan yang signifikan khususnya bagi pedagang kecil yang selama ini mengandalkan fleksibilitas platform digital untuk mempertahankan usaha mereka.

**Sektor perdagangan Indonesia kini berada di persimpangan antara kebutuhan proteksi industri domestik dan tuntutan efisiensi ekonomi digital.** Tanpa kalibrasi kebijakan yang tepat dan konsisten, sektor ini berisiko terjebak dalam jaring regulasi yang justru menghambat adaptasi terhadap dinamika perdagangan global yang terus berevolusi dengan kecepatan eksponensial.

## AKOMODASI DAN TRANSPORTASI

**Sektor transportasi Indonesia sepanjang Januari–Mei 2025 belum menunjukkan sinyal pemulihan.** Penurunan kinerja sektor ini mencerminkan realitas pahit menurunnya mobilitas masyarakat yang terhimpit tekanan ekonomi. Subsektor angkutan laut dan udara mengalami kontraksi cukup dalam hingga -28,5% dan -13,1% secara year-on-year pada Mei 2025. Meski angkutan kereta api masih bertahan di zona ekspansif, momentum pertumbuhannya mulai menunjukkan sinyal pelemahan yang mengkhawatirkan.

**Ancaman baru mengintai dari rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) yang berpotensi memperdalam tekanan kontraksi transportasi secara menyeluruh.** Dengan lebih dari 1 juta pengemudi dan 25 juta UMKM yang bergantung pada ekosistem digital ini, kenaikan tarif dikhawatirkan akan menciptakan efek domino: menekan permintaan layanan, menurunkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi terjangkau, dan pada akhirnya memperburuk daya beli yang sudah mengalami pelemahan.

Tanpa mitigasi kebijakan yang tepat atau penguatan sistem angkutan publik, tekanan terhadap sektor transportasi berpotensi meluas dan menurunkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

### ***Paradoks Sektor Akomodasi: Wisatawan Melonjak, Sektor Terkontraksi***

**Subsektor akomodasi mengalami anomali dimana sektor ini mengalami kontraksi sebesar -0,48% pada kuartal I-2025 di tengah membanjirnya kunjungan wisatawan.** Bahkan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik hingga Mei 2025 telah melampaui rekor empat tahun terakhir. Kontradiksi ini mengungkap perubahan struktural dalam industri perhotelan nasional yang telah berlangsung sejak kuartal I-2023.

**Akar masalah tertuju pada merosotnya tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang yang tetap berada di zona rendah dan negatif sepanjang 2025 lebih rendah dibandingkan capaian 2022-2023.** Fenomena ini mencerminkan pergeseran perilaku konsumen yang cenderung memilih akomodasi dengan harga lebih ekonomis untuk memangkas biaya akomodasi, sebuah adaptasi rasional di tengah tekanan daya beli masyarakat.

**Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada awal 2025 ikut memperparah tekanan sektor akomodasi, khususnya hotel-hotel yang mengandalkan segmen MICE (*meeting, incentive, convention, and exhibition*).** Pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan penyelenggaraan acara resmi di berbagai provinsi menciptakan kontraksi permintaan yang signifikan, menunjukkan betapa rentannya sektor ini terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

### ***Anggaran Infrastruktur Berlimpah, Efisiensi Logistik Stagnan***

**Indonesia terjebak dalam paradoks pembangunan infrastruktur, di mana investasi masif selama satu dekade terakhir tidak berkorelasi positif dengan peningkatan efisiensi logistik nasional.** Skor *Logistic Performance Index* (LPI) Indonesia justru merosot dari 3,15 pada 2018 menjadi 3,00 pada 2023, mengungkap kegagalan struktural dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan optimalisasi sistem logistik.

**Menurunnya kinerja LPI ini mencerminkan tantangan sistemik dan fundamental akibat lemahnya integrasi antar-moda transportasi, ketidakefisienan rantai distribusi, dan disparitas kualitas layanan.** Ironisnya, pemerintah lebih banyak menggelontorkan anggaran untuk pembangunan jalan tol yang kurang efisien dan berbiaya tinggi ketimbang memperkuat moda logistik berbasis kereta api yang jauh lebih murah dan efisien untuk pengangkutan barang jarak jauh.

**Target ambisius pemerintah menurunkan biaya logistik dari 14,5% menjadi 9% terhadap PDB kini menghadapi tantangan implementasi yang krusial melalui kebijakan zero ODOL (*Over Dimension Over Load*) pada kendaraan logistik di semester pertama 2025. Meski bertujuan mengurangi kerusakan infrastruktur dan mendorong peralihan ke moda transportasi yang lebih efisien, kebijakan ini berpotensi menciptakan disrupsi jangka pendek yang kontraproduktif.**

**Dalam realitasnya, penerapan zero ODOL diproyeksikan akan meningkatkan biaya logistik jangka pendek** akibat kebutuhan penyesuaian armada, potensi disrupsi distribusi, dan keterbatasan kapasitas moda alternatif seperti kereta api dan kapal laut. Dengan infrastruktur pendukung yang belum optimal dan minimnya moda alternatif, dampak kebijakan ini berisiko menghambat efisiensi alih-alih memperbaikinya.

**Keberhasilan program zero ODOL menuntut orkestrasi kebijakan yang komprehensif** terdiri dari penguatan kapasitas angkutan kereta api dan laut, integrasi sistemik antar-moda transportasi, serta restrukturisasi fundamental rute distribusi dan sistem pergudangan nasional. Tanpa pendekatan holistik ini, cita-cita efisiensi logistik akan tetap menjadi mimpi di tengah realitas infrastruktur yang fragmentatif dan tidak terintegrasi.

## Rekomendasi

Untuk itu, dalam waktu kurang dari enam bulan ke depan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis yang terfokus untuk mempercepat pemulihan dan menjaga momentum pertumbuhan. Beberapa langkah penting yang dapat segera dilakukan antara lain:

**Pertama, memperluas dan memperpanjang paket stimulus ekonomi.** Program bantuan tunai langsung perlu diperluas jangkauannya untuk menjangkau lebih banyak rumah tangga menengah ke bawah, dengan fokus khusus pada pemulihan kemampuan konsumsi makanan pokok. Pemerintah juga bisa mempertimbangkan kebijakan diskon tarif listrik mengingat biaya listrik menyumbang rata-rata 10% pengeluaran rumah tangga Indonesia.

**Kedua, pemerintah dapat membuka opsi insentif bersyarat.** Insentif ini diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan PHK. Insentif akan berupa keringanan pajak penghasilan badan, subsidi upah karyawan, atau akses kredit berbunga rendah. Paralel dengan ini, program padat karya di sektor infrastruktur dan layanan publik bisa digunakan solusi jangka pendek untuk menyerap 11,1 juta pekerja informal yang kehilangan kesempatan kerja layak.

**Ketiga, percepat eksekusi belanja pemerintah yang bersifat strategis.** Pemerintah perlu membentuk *fiscal delivery task force* lintas kementerian/lembaga guna mengatasi berbagai hambatan dalam realisasi anggaran. Selain itu, insentif kinerja dan pelaporan berbasis hasil perlu diintegrasikan ke dalam mekanisme penganggaran agar belanja prioritas dapat terealisasi lebih cepat dan tepat sasaran.

**Keempat, Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan pemetaan sektoral terhadap hambatan non-tarif (NTM) Indonesia sebelum menerapkan penghapusan NTM secara selektif untuk produk asal Amerika Serikat.** Sebagaimana yang pernah disampaikan pada [COREInsight April Silam](#). Penghapusan tersebut harus didasarkan pada prinsip resiprositas, transparansi, dan non-diskriminasi, serta disertai kajian dampak terhadap sektor domestik yang rentan. NTM yang berfungsi melindungi kesehatan, keamanan pangan, dan lingkungan tetap perlu dipertahankan sesuai standar internasional, agar kebijakan perdagangan tidak hanya berpihak pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga menjaga kedaulatan regulasi nasional dan daya saing industri dalam negeri.

**Kelima, pemerintah perlu melakukan optimalisasi penyerapan produk lokal.** Dalam hal ini pemerintah melalui Bulog perlu menambah komoditas strategis lainnya selain beras seperti jagung dan daging ayam serta memberikan subsidi kepada industri hilir agar menggunakan bahan baku domestik. Misalnya, memberikan subsidi jagung untuk pakan ternak peternak skala kecil.

**Keenam, mempercepat hilirisasi komoditas pertanian menjadi produk bernilai tambah.** Pentingnya membangun *linkage* antara petani/peternak dan industri menengah-besar yang didukung modernisasi teknologi dimulai dari produksi, pasca panen dan pengolahan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk lokal.

**Ketujuh, melindungi industri domestik dari serbuan impor ilegal yang murah melalui pengetatan verifikasi impor dengan melibatkan jasa *Testing, Inspection and Certification (TIC)*.** Selain itu perlu adanya penambah anggaran subsidi untuk industri kunci seperti makanan-minuman, petrokimia, logam dasar, dan elektronik yang dapat menekan biaya produksi seperti subsidi energi dan infrastruktur pendukung agar mampu bersaing dengan produk impor.



## **PENANGGUNG JAWAB**

Mohammad Faisal, Ph.D

## **PENASIHAT**

Akhmad Akbar Susanto, Ph.D

Prof. Dr. Sahara, S.P., M.Si.

Dr. Etika Karyani

Muhammad Ishak Razak, M.A

## **PENULIS**

Yusuf Rendy Manilet

Azhar Syahida

Eliza Mardian

Fathya Nirmala Hanoum

Achmad Hanif Imaduddin

Rivan Dwi Aghnitama

Dwi Setyorini

Sahaya Aulia Azzahra

Fitri Yana

Lailatun Nikmah

Fitri Ika Pradyasti

Huzni Mubarak

## **DESAIN DAN PUBLIKASI**

Agus Priyanto

Nando Purnama Aji

## **Narahubung Publikasi dan Kerja Sama**

 Emma Efidayanti  
0813-1408-0397